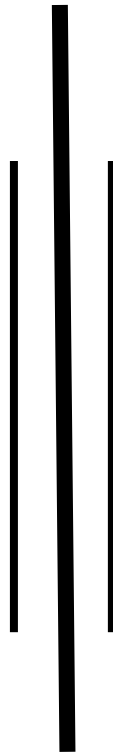


**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 279.1 / SK / 2022

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023;
- KEDUA : Pemberlakuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagai Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 23 Juli 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680919 199011 1 00

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan melaksanakan tugas sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat Kota Banda Aceh. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Renja merupakan rancangan perencanaan berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh. Renja merupakan perbaikan terhadap dokumen Rancangan Renja dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis serta merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kota Banda Aceh di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik.

Dokumen Renja 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh yang didasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2023-2026 yang telah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik serta memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan optimal sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFOTIK TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfo	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo.....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Diskominfo	45
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK ...	59
BAB V PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah yang akan menjadi panduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tersebut dimasa yang akan datang. Renja disusun melalui proses penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (RPD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 yang berisikan informasi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi yang berlaku serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

Rencana Kerja (Renja) Diskominfo adalah dokumen yang akan menjadi panduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo pada periode satu tahun pelaksanaan. Renja merupakan dokumen penyempurnaan Rancangan Renja dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Renstra Diskominfo tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Diskominfo tahun yang lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja Diskominfo tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perencanaan dan pembangunan yang berfokus kepada pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia. Dokumen Renja kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Banda Aceh untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai pedoman Diskominfo di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Prinsip Penyusunan Renja Diskominfo adalah :

1. Substansi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RKPD;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirincikan menurut sumber pendanaan yang diusulkan serta memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keluaran dan total dana yang diperlukan;
3. Berpedoman pada Renstra Diskominfo tahun 2023-2026 dimana hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang telah disusun;
4. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Diskominfo tahun lalu dan Renja Diskominfo tahun berjalan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan alternatif dan/atau baru dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- r. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

- s. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- t. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan efektifitas rencana pembangunan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan baik di tingkat daerah/kota maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Diskominfo Kota Banda Aceh untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Teknologi, Informatika, Komunikasi dan Statistik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
(DISKOMINFOTIK) TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfo.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 24 (dua puluh empat) kegiatan pada 8 (delapan) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik (80,56%)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (83,33%)
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (90,35%)
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (68,48%)
 - Kegiatan Pelayanan jasa pelelangan/pengadaan barang (33,33%)
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (46,67%)
 - Kegiatan Pengadaan Mebeleur (0%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (0%)

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (0%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (54,41%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer (0%)
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (0%)
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (88,35%)
- d. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah (66,67%)
- e. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
- Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi (66,67%)
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi (83,33%)
 - Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi (0%)
 - Kegiatan Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi (66,67%)
- f. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (50%)
- g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (33,33%)
- h. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (72,22%)
 - Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (72,22%)

2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Terdapat 8 (delapan) kegiatan pada 5 (lima) program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)
 - Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah (100%)
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran (100%)
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (100%)
- c. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (100%)
- d. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (100%)
- e. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
 - Kegiatan Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah (100%)

3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak terdapat kegiatan dan program yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Diskominfo.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dikarenakan Diskominfo belum memiliki gedung sendiri dan merupakan bagian dari gedung Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga pemeliharaan peralatan gedung kantor tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu pada program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian target belum maksimal dikarenakan oleh beberapa hal seperti jumlah anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan baju dinas, adanya kenaikan indeks harga satuan penyediaan baju dinas dan juga karena tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan baju dinas serta pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih strategis. Untuk Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dan Program Program Kerjasama Informasi dan Media Masa belum mencapai target dikarenakan adanya pengalihan anggaran kebeberapa program dan kegiatan yang lebih mendesak atau prioritas serta adanya kegiatan refocusing anggaran dikarenakan terjadinya peristiwa pandemi Covid-19.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai adalah belum maksimalnya performa dan kinerja dari Diskominfo di dalam memenuhi target dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Hal ini sangat dipengaruhi dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Belum adanya gedung kantor mandiri Diskominfo menyebabkan pencapaian target program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Disiplin Aparatur masih belum maksimal. Implikasi dari masalah ini adalah menargetkan pada tahun 2022 pengelolaan Gedung Eks DPRK sudah berada di bawah dan menjadi aset Diskominfo sehingga pemenuhan target dan tupoksi Diskominfo menjadi semakin maksimal. Selain itu pada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target capaian program Renstra pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan membuat

Diskominfo harus memberikan skala prioritas pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan kegiatan lapangan sehingga membuat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara daring atau online semakin meningkat. Hal ini membuat Diskominfo harus menyesuaikan rencana dan strategi di dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan, seperti memperkuat kemampuan diseminasi informasi secara digital melalui media daring, memperkuat layanan internet dan interkoneksi yang disediakan dan lain-lain.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak terserapnya anggaran pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disebut di atas adalah dengan membakukan pengelolaan Gedung Madani Center yang saat ini berbagi pakai dengan Dinas Perhubungan untuk dikelola sepenuhnya oleh Diskominfo Kota Banda Aceh atau dengan mempercepat pembangunan dan pemeliharaan Gedung Eks DPRK yang akan dijadikan gedung baru Diskominfo, melakukan modifikasi strategi serta prioritasasi pada target beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkena refocusing anggaran dikarenakan peristiwa pandemi COVID-19.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.a.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020
Kota Banda Aceh

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi target Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2020 (%)	Ket
1					2	3	4		5		6=5/4	7
1					Urusan Wajib							
1	25				Komunikasi dan Informasi							
1	25	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</i>	100	%	84,01	%	84,01	
1	25	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	36	Bulan	29	Bulan	80,56	
1	25	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	36	Bulan	30	Bulan	83,33	
1	25	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	114	Jenis	103	Jenis	90,35	
1	25	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	21	Jenis	21	Jenis	100,00	
1	25	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18	Jenis	18	Jenis	100,00	
1	25	01	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	14520	Porsi	9944	Porsi	68,48	

1	25	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	60	Laporan	60	Laporan	100,00	
1	25	01	19		Pelayanan jasa pelelangan / pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	18	Bulan	6	Bulan	33,33	
1	25	01	20		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/teknis perkantoran	Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	36	Bulan	36	Bulan	100,00	
1	25	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</i>	100	%	22.34	%	22,34	
1	25	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2	Unit	-	Unit	0,00	
1	25	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	2	Jenis	-	Jenis	0,00	
1	25	02	09		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	30	Jenis	14	Jenis	46,67	
1	25	02	10		Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	10	Jenis	-	Jenis	0,00	
1	25	02	22		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1	Kali	-	Kali	0,00	
1	25	02	24		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional yang dilaksanakan	12	Kali	12	Kali	100,00	
1	25	02	26		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	20	Kali	-	Kali	0,00	
1	25	02	28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	136	Kali	74	Kali	54,41	
1	25	02	29		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Jumlah pemeliharaan mebeluer yang dilaksanakan	20	Kali	-	Kali	0,00	

1	25	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah</i>	100	%	44.17	%	44,17	
1	25	03	01		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi elektronik yang di sediakan	1	Unit	-	Unit	0,00	
1	25	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	103	Stel	91	Stel	88,35	
1	23	15			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	83.33	%	83,33	
1	23	15	01		Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik daerah yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	
1	23	15	02		Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67	
1	25	15			<i>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa</i>	<i>Persentase terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik</i>	60	%	63.33	%	63,33	
1	25	15	02		Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan	126	Kali	84	Kali	66,67	
1	25	15	03		Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	90	Orang	75	Orang	83,33	
1	25	15	05		Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	2	Unit	0	Unit	0,00	
1	25	15	06		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	24	Unit	24	Unit	100,00	
1	25	15	07		Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	3	Kegiatan	2	Kegiatan	66,67	

1	25	15			<i>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya data base infokom</i>	40	%	50,00	%	50,00	
1	25	16	01		Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	50,00	
1	25	17			<i>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</i>	<i>Persentase terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo</i>	60	%	33,33	%	33,33	
1	25	17	01		Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi	90	Orang	30	Orang	33,33	
1	25	18			<i>Program Kerjasama Informasi dan Media Masa</i>	<i>Persentase terserapnya informasi pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat</i>	60	%	81,48	%	81,48	
1	25	18	01		Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100,00	
1	25	18	02		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan	18	Kali	13	Kali	72,22	
1	25	18	03		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	18	Kali	13	Kali	72,22	

Sementara itu, dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomor rekening dan penambahan sub kegiatan pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Diskominfo serta perkiraan realisasi capaian target pada tahun 2022 (tahun berjalan) dimana perkiraan capaian atau realisasi target adalah penambahan antara realisasi tahun 2021 dengan perkiraan realisasi pada tahun 2022 sesuai dengan Target pada Renstra Penyesuaian periode 2021-2022.

Berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun 2021 dan perkiraan capaian realisasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ada 10 (sepuluh) sub kegiatan pada 6 (enam) kegiatan dalam 4 (empat) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (50 %)
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (51,25%)
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (60%)

- b. Program Informasi & Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (50%)
 - Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan (50%)
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (50%)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas (50%)
 - c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (50%)
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral (50%)
 - d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
 - Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota (50%)
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Ada 21 (dua puluh satu) sub kegiatan pada 9 (sembilan) kegiatan dalam 4 (empat) program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yaitu :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (100%)

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)

b. Program Informasi & Komunikasi Publik

- Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (100%)
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (100%)
 - Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media (100%)

c. Program Aplikasi Informatika

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (100%)
- Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
 - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota (100%)
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah (100%)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (100%)
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (100%)
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (100%)

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (100%)

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak terdapat sub kegiatan pada kegiatan dalam program program yang telah melebihi target Renja dan Renstra Diskominfo.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;

Ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Renstra dan Renja Diskominfo Tahun 2021 yang pada pelaksanaannya tidak dapat dikerjakan dikarenakan oleh terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo Kota Banda Aceh akibat kebijakan *refocusing* anggaran. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimana hal

ini menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo sangat terbatas dan bahkan anggarannya tidak diberikan atau dihapuskan. Hal ini terjadi pada sub kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE, Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota. Selain itu hal ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran ke beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan, sasaran dan tupoksi kinerja Diskominfo.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target yaitu berjalannya pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap-tiap Perangkat Daerah dalam Kota Banda Aceh.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak terserapnya anggaran pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disebut di atas adalah mengalokasikan anggaran kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi serta meningkatkan kualitas SDM,

sarana prasarana, profesionalisme, kemampuan dan pemahaman uraian kerja dan seluruh unsur pendukung tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh secara berkesinambungan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Diskominfo Kota Banda Aceh dan pencapaian renstra Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2021 dan perkiraan capaian realisasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.b.

Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kota Banda Aceh

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Ket
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5	6	7=6/5	8	9=8+6	10=9/4	11
2					Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar										
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	100	%	64,29	100	83,04	83,04	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	100	%	0,00	100	50,00	50,00	
2	16	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	10	Dokumen	5	0	0	5	5	50,00	
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	

2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	24	Bulan	12	12	100	12	24	100,00	
2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	24	Bulan	12	12	100	12	24	100,00	
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100	%	100	%	0,00	100	51,25	51,25	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	80	Stel	39	0	0	41	41	51,25	
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Jenis	6	6	100	6	12	100,00	
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14	Jenis	7	7	100	7	14	100,00	
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	40	Laporan	20	20	100	20	40	100,00	
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%	100	%	50,00	100	80,00	80,00	

2	16	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	Unit	2	-	0	3	3	60,00	
2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	Unit	10	10	100	10	20	100,00	
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	24	Bulan	12	12	100	12	24	100,00	
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	Bulan	12	12	100	12	24	100,00	
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	4	4	100	4	8	100,00	
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	116	Unit	58	58	100	58	116	100,00	
2	16	02			Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100	%	100	%	42,86	100	71,43	71,43	

2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100	%	100	%	42,86	100	71,43	71,43	
2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Aspirasi atau Pengaduan Warga yang Direspon	24	Aspirasi	12	0	0	12	12	50,00	
2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Rilis Berita, Informasi dan Liputan yang dipublikasi	1200	Berita	600	600	100	600	1200	100,00	
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Direspon dan Diverifikasi	24	Permohonan	12	12	100	12	24	100,00	
2	16	02	2.01	07	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa dan Media Luar Ruang yang Digunakan Untuk Mendesiminasikan Informasi	10	Media	5	5	100	5	10	100,00	
2	16	02	2.01	08	Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah di Fasilitas Publik Kota Banda Aceh	20	Kali	10	0	0	10	10	50,00	
2	16	02	2.01	10	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM OPD yang diberikan Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	90	Orang	45	0	0	45	45	50,00	
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	2	Kali	1	0	0	1	1	50,00	
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100	%	100	%	91,67	100	100,00	100,00	

2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang Diberikan Layanan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah	88	SKPD	44	44	100	44	88	100,00	
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	100	%	100	%	83,33	100	100,00	100,00	
2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah SDM Pemda yang Dilatih Untuk Pembuatan Dokumen Proses Bisnis SKPK	94	Orang	47	47	100	47	94	100,00	
2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Jangka Waktu Pelayanan Operasional Pusat Data	2	Tahun	1	1	100	1	2	100,00	
2	16	03	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Kota	2	Dokumen	1	1	100	1	2	100,00	
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dikembangkan	6	Aplikasi	3	3	100	3	6	100,00	
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Jenis Penguatan Command Center Kota yang Dilaksanakan	4	Jenis	2	2	100	2	4	100,00	
2	16	03	2.02	12	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monev SPBE	1	Laporan	0	0	0	1	1	100,00	
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	100	%	0,00	100	50,00	50,00	

2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100	%	100	%	0,00	100	50,00	50,00	
2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang Memiliki Kapasitas Mutu Integrasi Statistik Daerah	136	Orang	68	0	0	68	68	50,00	
2	20	02	2.01	04	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang diverifikasi/validasi, diupdate dan dianalisis open/public datasetnya	68	OPD	34	0	0	34	34	50,00	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	%	100	%	50,00	100	75,00	75,00	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100	%	100	%	100,00	100	100,00	100,00	
2	21	02	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Jangka Waktu Layanan Sistem Keamanan Jaringan yang Diadakan	2	Tahun	1	1	100	1	2	100,00	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100	%	100	%	0,00	100	50,0	50,00	
2	21	02	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	Jumlah Surat Sandi yang Dikelola	400	Surat	200	0	0	200	200	50,00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Capaian kinerja pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dihitung berdasarkan capaian terget kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang telah tertuang dalam Renstra Diskominfo, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mendukung capaian tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada beberapa indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Pertama, terkait dengan Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu ditahun 2023 ditargetkan mencapai 27%, dimana pada tahun 2021 mencapai 20%. Persentase website OPD yang aktif ditahun 2023 ditargetkan mencapai 82%, dimana pada tahun 2021 mencapai 75%. Terkait dengan Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan ditahun 2023 ditargetkan mencapai 57%, dimana pada tahun 2021 mencapai 50%. Begitu juga dengan Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ditahun 2023 mencapai 100%, dimana indikator tersebut mencapai 100% di tahun 2021. Untuk Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi pada Tahun 2023 ditargetkan mencapai Status Ada dimana pada tahun 2021 mencapai Status Ada. Untuk Buku "Kabupaten dalam Angka" ditahun 2023 ditargetkan Ada dimana pada Tahun 2021 juga pada Status Ada. Buku "PDRB" ditargetkan Ada dimana pada Tahun 2021 juga pada Status Ada. Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ditargetkan mencapai 32%, dimana pada tahun 2021 mencapai angka 25% dari total jumlah OPD.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISKOMINFOTIK				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase data Statistik Sektorial Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu			20%	25%	27%	29%	20%	25%	27%	29%	Tercapai
2	Persentase website OPD yang aktif			75%	80%	82%	84%	75%	80%	82%	84%	Tercapai
3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			50%	55%	57%	59%	50%	55%	57%	59%	Tercapai
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
6	Buku "Kabupaten dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
7	Buku "PDRB"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
8	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			25%	28%	32%	36%	25%	28%	32%	36%	Tercapai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo Kota Banda Aceh telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kerja yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Dalam RPD tersebut, Diskominfo mendukung pencapaian tujuan RPD Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah” dengan Sasaran “Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah”.

Dalam mendukung capaian misi tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada 8 (delapan) indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Dari 8 indikator pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.2, realisasi capaian 8 indikator pada tahun 2021 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator sebagaimana disebutkan sebelumnya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang mungkin timbul diantaranya yaitu :

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada, dan
3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum memadai.

Permasalahan di atas tentunya akan berdampak pada terhambatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kontribusinya pada capaian program nasional seperti RPJMN, SPM dan SDGs. Khusus untuk SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, dari ketiga permasalahan dan hambatan diatas diperkirakan akan berdampak pada tujuan ke-7, ke-9, dan tujuan ke-11.

Untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan statistik serta persandian sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh ada beberapa tantangan serta peluang yang harus dihadapi yaitu :

1. Tantangan

- Tidak konsistensinya penerapan regulasi;
- Terbitnya beberapa regulasi baru terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Belum adanya evaluasi rencana induk pengembangan TIK;
- Adanya tuntutan perencanaan bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkualitas;
- Adanya kekayaan potensi bidang komunikasi, informatika dan statistik yang belum tergarap secara maksimal.

2. Peluang

- Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Keberadaan infrastruktur TIK Kota yang cukup memadai.

Berdasarkan tupoksi pelayanannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota;
3. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada;

4. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu, dan
5. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki.

Formulasi di dalam menyikapi isu-isu di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh akan menempuh beberapa hal diantaranya, yaitu:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dengan menyesuaikan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan analisis gambaran umum kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Setelah dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD dan RPD

terdapat beberapa penyesuaian pada Renja. Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak ada perubahan dikarenakan oleh Ranwal RKPD dan RPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana ada perubahan kode rekening dan penambahan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo pada Tahun Anggaran 2023.

Kebutuhan Dana pada Renja juga berbeda dengan Pagu Indikatif yang ada pada Ranwal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh adanya perubahan anggaran yang diajukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritasasi dan memaksimalkan pencapaian target kinerja Diskominfo. Salah satu alasan utama peningkatan pagu anggaran ini adalah adanya penyisipan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dana Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 bisa dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kota Banda Aceh

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%		8.314.588.749	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%		7.672.988.749	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%		0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%		0	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	-	-
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		6.950.463.265	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		6.308.863.265	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.855.653.265	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.214.053.265	-

6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2.094.810.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2.094.810.000	-
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		80.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		80.300.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	80.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	80.300.000	-
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		121.357.103	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		121.357.103	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5.861.356	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5.861.356	-
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	15.495.747	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	15.495.747	-
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	100.000.000	-

13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		133.319.890	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		133.319.890	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	-	-
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	133.319.890	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	133.319.890	-
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		750.534.443	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		750.534.443	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	698.609.113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	698.609.113	-
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	51.925.330	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	51.925.330	-

19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		278.614.048	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		278.614.048	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	90.487.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	90.487.100	-
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	188.126.948	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	188.126.948	-
22	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%		1.007.390.603	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%		1.098.390.603	
23	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%		1.007.390.603	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%		1.098.390.603	
24	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	55.888.307	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	55.888.307	-

25	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	58.371.382	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	258.371.382	-
26	Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	98.837.848	Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	98.837.848	-
27	Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	Layanan	685.240.432	Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	Layanan	576.240.432	Penyisipan Dana DOKA dan POKIR
28	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	30.935.900	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	30.935.900	-
29	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45	Orang	30.816.734	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45	Orang	30.816.734	-
30	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	47.300.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	47.300.000	Penyisipan Dana POKIR

31	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%		505.549.393	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%		505.549.393	
32	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%		153.115.626	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%		153.115.626	
33	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44	Unit	153.115.626	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44	Unit	153.115.626	-
34	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	persentase layanan e-government yang dikelola	100%		352.433.767	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	persentase layanan e-government yang dikelola	100%		352.433.767	
35	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaa n dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	1	Dokumen	76.204.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	76.204.000	-
36	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	38.150.919	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	38.150.919	-

37	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44	Perangkat Daerah	46.742.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44	Perangkat Daerah	46.742.000	-
38	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	42.987.367	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	42.987.367	-
39	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	148.349.481	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	148.349.481	-
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	-	-
41	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%		175.002.770	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%		175.002.770	
42	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%		175.002.770	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%		175.002.770	

43	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68	Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68	Orang	-	-
44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34	Orang	175.002.770	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34	Orang	175.002.770	-
45	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		18.127.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		18.127.000	
46	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%		18.127.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%		18.127.000	
47	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	18.127.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	18.127.000	-

48	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%		-	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%		-	
49	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	-	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	-	-
TOTAL BELANJA						10.020.658.515						9.470.058.515	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang diterima oleh Diskominfo dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh akan diperoleh berbagai usulan aspirasi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh yang akan disesuaikan dengan program rencana pembangunan Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 sesuai dengan RPD Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Melalui pelaksanaan program POKIR ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRK Banda Aceh.

Terdapat beragam usulan-usulan masyarakat yang terangkum pada Pokir yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2023 terkait dengan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik serta Jumlah Layanan Hubungan Media, dimana usulan-usulan ini masuk pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dan Layanan Hubungan Media. Usulan ini diperoleh melalui POKIR Anggota DPRK yang telah diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan pot-pot usulan yang sudah disediakan oleh Diskominfo. Pot-pot usulan ini harus sesuai dengan isu-isu penting dan juga tupoksi dari Diskominfo yang bergerak di dalam bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik.

Usulan Anggota DPRK atau Pokir yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4.
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	<p>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p>	Kota Banda Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	- Publikasi, Propaganda, berita melalui Media Cetak/Elektronik untuk diseminasi informasi publik 2 Paket/Kegiatan sebesar Rp 200.000.000,-	
2	<p>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</p>	Kota Banda Aceh	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Publikasi, Propaganda, berita melalui Media Cetak/Elektronik untuk diseminasi informasi publik 5 Paket/Kegiatan sebesar Rp 700.000.000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota (Pemko) Banda Aceh di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) serta statistik. Hal ini diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa Diskominfo dengan Tipe A mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh

Hal ini selaras dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh tahun 2007 - 2027 pada Misi kedua yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum” dimana pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemko Banda Aceh Diskominfo mendukung pencapaian tujuan RPD Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah” untuk pencapaian Sasaran “Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah” dan Indikator Tujuan pencapaian “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Beberapa pencapaian kinerja Diskominfo terlihat pada pencapaian indeks e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sektor kementerian komunikasi dan informatika dimana nilai indeks e-government atau pemerintahan elektronik

nasional dimulai dengan nilai 2,8 ditahun 2015, 2,9 ditahun 2016, 3,0 ditahun 2017,dan 3,2 ditahun 2018, serta 3,4 ditahun 2019.

Disamping itu Diskominfo juga terus berupaya untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dimana pada tahun 2021 Diskominfo berhasil meraih nilai akuntabilitas kinerja 87.60 dengan predikat A, dimana pada tahun 2020 meraih nilai akuntabilitas kinerja 80.22 dengan predikat A dan pada tahun 2019 meraih nilai akuntabilitas kinerja 10.15 dengan predikat D.

Diskominfo Kota Banda Aceh terus berupaya untuk meningkatkan indeks pemerintahan elektronik (e-government) dari tahun ke tahun, terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, pelayanan informasi publik kepada masyarakat luas dan stakeholder yang membutuhkannya serta meningkatkan pencapaian Nilai SAKIP yang akan mendongkrak pencapaian Nilai SAKIP Pemko Banda Aceh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfo

Perumusan tujuan dan sasaran adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dimana tujuan dan sasaran merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh melalui Renja Tahun 2023 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut

1. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai

motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi;
- Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Renja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan Diskominfo Kota Banda Aceh tentunya telah sesuai dan mendukung beberapa faktor seperti berikut :

- Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RPD;
- Mendukung tujuan SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, terdapat 3 kesesuaian yakni tujuan ke-7 (*affordable and clean energy*), ke-9 (*industry, innovation and infrastructure*) dan tujuan ke-11 (*sustainable cities and communities*);
- Mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Diskominfo Kota Banda Aceh;
- Meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh;
- Meningkatkan Indeks Nilai SAKIP Diskominfo, dan
- Mendukung Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan Smart City.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Diskominfo Kota Banda Aceh memiliki tupoksi di dalam pencapaian kinerja di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK), statistik dan persandian yang tentunya disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan harus ditopang oleh data statistik yang berkualitas dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut ditetapkanlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di Diskominfo antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Informasi & Komunikasi Publik

2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Aplikasi Informatika

3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota

3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota

3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota

- 4.1.1.Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- 4.1.2.Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
 - 5.1.1.Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
 - 5.2.1.Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota

Penyebaran lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo untuk tahun 2023 lebih banyak dilakukan di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman dibandingkan dengan delapan kecamatan lainnya di Kota Banda Aceh dengan total 5 program, 13 Kegiatan dan 31 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena mayoritas aktivitas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dilaksanakan di kantor Diskominfo Kota Banda Aceh yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman, dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2023 mencapai Rp 9.470.058.515,-.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh sedikit berbeda dengan Ranwal RKPD. Terdapat dua sub kegiatan pada Ranwal RKPD yang pagu anggarannya berbeda dengan pagu anggaran pada Renja Tahun 2023 yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dan Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Hal ini dikarenakan oleh pada tiga sub kegiatan tersebut dilakukan penyesuaian anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dilakukan penyisipan usulan POKIR dari anggota DPRK Banda Aceh yang telah disetujui dan diinput ke dalam aplikasi SIPD. Usulan Anggota DPRK atau Pokir tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh Diskominfo.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kota Banda Aceh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
2	16	2	20		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik										
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	7.672.988.749	APBK	-	100	%	8.435.945.852
2	16	01	20.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	-	APBK	-	100	%	-
2	16	01	20.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Dokumen	-	APBK	-	5	Dokumen	-
2	16	01	20.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	6.308.863.265	APBK	-	100	%	6.950.463.265
2	16	01	20.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	33	Orang/Bulan	4.214.053.265	APBK	-	33	Orang/Bulan	4.855.653.265

2	16	01	20.2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Dokumen	2.094.810.000	APBK	-	12	Dokumen	2.094.810.000
2	16	01	20.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	80.300.000	APBK		100	%	80.300.000
2	16	01	20.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	60	Paket	80.300.000	APBK	-	60	Paket	80.300.000
2	16	01	20.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	121.357.103	APBK	-	100	%	242.714.206
2	16	01	20.6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	6	Paket	5.861.356	APBK	-	6	Paket	5.861.356
2	16	01	20.6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	7	Paket	15.495.747	APBK	-	7	Paket	15.495.747
2	16	01	20.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	20	Laporan	100.000.000	APBK	-	20	Laporan	221.357.103
2	16	01	20.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	133.319.890	APBK	-	100	%	133.319.890
2	16	01	20.7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	-	APBK	-	3	Unit	-
2	16	01	20.7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10	Unit	133.319.890	APBK	-	10	Unit	133.319.890

2	16	01	20.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	750.534.443	APBK	-	100	%	750.534.443
2	16	01	20.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	698.609.113	APBK	-	12	Laporan	698.609.113
2	16	01	20.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	51.925.330	APBK	-	12	Laporan	51.925.330
2	16	01	20.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	278.614.048	APBK		100	%	278.614.048
2	16	01	20.9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4	Unit	90.487.100	APBK	-	4	Unit	90.487.100
2	16	01	20.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Unit	188.126.948	APBK	-	58	Unit	188.126.948
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.098.390.603	APBK	-	100	Persen	922.263.021
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.098.390.603	APBK	-	100	Persen	922.263.021

2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	55.888.307	APBK	-	1	Dokumen	55.888.307
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	258.371.382	APBK	-	1	Dokumen	58.371.382
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	98.837.848	APBK	-	1	Dokumen	60.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Layanan	576.240.432	DOKA/APBK	-	5	Layanan	687.067.432
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	30.935.900	APBK	-	1	Dokumen	30.935.900
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	45	Orang	30.816.734	APBK	-	45	Orang	15.000.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	47.300.000	APBK	-	1	Dokumen	15.000.000
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	505.549.393	APBK	-	100	Persen	457.199.912

2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	153.115.626	APBK	-	100	Persen	153.115.626
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Unit	153.115.626	APBK	-	44	Unit	153.115.626
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	352.433.767	APBK	-	100	Persen	304.084.286
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	76.204.000	APBK	-	1	Dokumen	76.204.000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	38.150.919	APBK	-	1	Unit	38.150.919
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	46.742.000	APBK	-	44	Perangkat Daerah	46.742.000
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	42.987.367	APBK	-	3	Unit	42.987.367
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	148.349.481	APBK	-	1	Dokumen	100.000.000

2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	-	APBK	-	1	Dokumen	-
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<i>Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah</i>	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	175.002.770	APBK	-	100	Persen	100.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	175.002.770	APBK	-	100	Persen	100.000.000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	68	Orang	-	APBK	-	68	Orang	-
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	34	Orang	175.002.770	APBK	-	34	Orang	100.000.000
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<i>Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	18.127.000	APBK	-	100	Persen	7.076.730
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	18.127.000	APBK	-	100	Persen	7.076.730
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	18.127.000	APBK	-	1	Laporan	7.076.730

2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	-	APBK	-	100	Persen	-
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	-	APBK	-	44	Perangkat Daerah	-
TOTAL										9.470.058.515					9.922.485.515

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK

Untuk mencapai tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh yakni tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi di dalam Kota Banda Aceh diperlukan rangkaian strategi dan kebijakan. Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut dibutuhkan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan.

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1) Program

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Persandian, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2) Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu

sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan beberapa kegiatan untuk menunjang program-program yang telah ada.

Untuk merealisasikan program-program di atas, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
12. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
13. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

3) Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau penerjemah dari aktivitas atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan Kegiatan-kegiatan di atas, ditetapkan sub kegiatan-sub kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan;
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
14. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
15. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
16. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
17. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
18. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan;

19. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
20. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
21. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
22. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
24. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
25. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
27. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;
28. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
29. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
30. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
31. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Diskominfo Tahun 2023
Kota Banda Aceh

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
1					2	3	4	5	6	7	8
2	16	2	20		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					9.470.058.515	
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		7.672.988.749	
2	16	01	20.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		-	
2	16	01	20.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	dokumen	-	ASN Diskominfo
2	16	01	20.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		6.308.863.265	
2	16	01	20.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	33	Orang/Bulan	4.214.053.265	ASN Diskominfo
2	16	01	20.2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Dokumen	2.094.810.000	ASN Diskominfo
2	16	01	20.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		80.300.000	

2	16	01	20.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	60	Paket	80.300.000	ASN Diskominfo
2	16	01	20.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		121.357.103	
2	16	01	20.6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	6	Paket	5.861.356	ASN Diskominfo
2	16	01	20.6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	7	Paket	15.495.747	ASN Diskominfo
2	16	01	20.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	20	Laporan	100.000.000	ASN Diskominfo
2	16	01	20.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		133.319.890	
2	16	01	20.7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	-	ASN Diskominfo
2	16	01	20.7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10	Unit	133.319.890	ASN Diskominfo
2	16	01	20.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		750.534.443	
2	16	01	20.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	698.609.113	ASN Diskominfo
2	16	01	20.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	51.925.330	ASN Diskominfo

2	16	01	20.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		278.614.048	
2	16	01	20.9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4	Unit	90.487.100	ASN Diskominfo
2	16	01	20.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Unit	188.126.948	ASN Diskominfo
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		1.098.390.603	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		1.098.390.603	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	55.888.307	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	258.371.382	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	98.837.848	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Layanan	576.240.432	Masyarakat Kota Banda Aceh

2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	30.935.900	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	45	Orang	30.816.734	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	47.300.000	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		505.549.393	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		153.115.626	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Unit	153.115.626	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		352.433.767	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	76.204.000	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	38.150.919	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	46.742.000	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	42.987.367	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	148.349.481	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	-	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					-	
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		175.002.770	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		175.002.770	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	68	Orang	-	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	34	Orang	175.002.770	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		18.127.000	

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		18.127.000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	18.127.000	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100%		-	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	-	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
TOTAL										9.470.058.515	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan acuan dasar atau pedoman bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 serta mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026. Penyusunan Renja bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan melalui berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta mewujudkan visi dan misi Diskominfo Kota Banda Aceh.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah Kota Banda Aceh di dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat Banda Aceh yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru dimana pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dokumen Renja Diskominfo Tahun 2023 diharapkan bisa menjelaskan arah pelayanan Diskominfo yang tertuang di dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan atau kebutuhan anggaran yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Catatan penting yang harus diperhatikan adalah dalam beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya semenjak tahun 2020, telah dilakukan tindakan *refocusing* anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi keadaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga di dalam pelaksanaan Program,

Sub Kegiatan Diskominfofik nantinya akan dilakukan kebijakan prioritasasi agar didapatkan capaian kinerja yang lebih terukur.

Hal-hal penting lainnya yang diharapkan menjadi pertimbangan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Diskominfofik Tahun 2023 ini adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Diskominfofik;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada, dan
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, elaborasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tercipta hubungan kerjasama yang sinergis dalam rangka mendukung pencapaian RPD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Demikianlah Dokumen Renja Diskominfofik Tahun 2023 ini kami susun dimana kami menyadari bahwa dokumen ini masih diperlukan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak untuk tercapainya penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Banda Aceh, Juli 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00